



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHAIDIR
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 226991

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	9.398.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/334 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 412 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/99 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.398.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	455.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA CRLACROA18HYB GRS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	294.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	126.362.003
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.273.862.003
III. HUTANG	Rp.	592.421.864
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.681.440.139

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.